

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN FRANCHISE
(Studi Penelitian Franchise Solchic)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

FAIZZATI DIFFA ASMARA PUTRI

C100160162

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN FRANCHISE
(Studi Penelitian Franchise Solchic)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

FAIZZATI DIFFA ASMARA PUTRI

C100160162

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Darsono, S.H.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE

(Studi Penelitian Franchise Solchic)

OLEH

FAIZZATI DIFFA ASMARA PUTRI

C100160162

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari : Jum'at, 26 Juni 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dosen Penguji:

1. Darsono, S.H., M.H.




(Ketua Dewan Penguji)

2. Septarina Budiwati, S.H., M.H

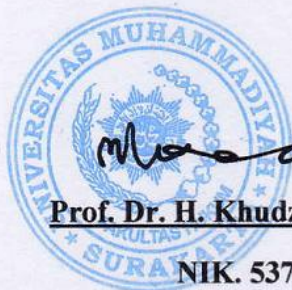
(Anggota I Dewan Penguji)

3. Inayah, S.H., M.H

(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum.

NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam artikel publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Juni 2020

Yang menyatakan



FAIZZATI DIFFA ASMARA PUTRI

C100160162

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE (Studi Penelitian Franchise Solchic)

Abstrak

Seiring dengan perkembangan jaman, bisnis usaha franchise berkembang dengan pesat ditengah-tengah masyarakat. Bisnis usaha yang sangat praktis ini hingga kini belum di antisipasi atau mendapatkan pengaturan hukum secara khusus. Karena ketiadaan pengaturan secara khusus. Walaupun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur lembaga franchise, tidak berarti bahwa lembaga ini sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Hal ini disebabkan pada lembaga franchise di dalamnya terkandung hubungan-hubungan hukum para pihak sebagai akibat perjanjian yang dibuat, tentunya asas yang dapat dijadikan patokan adalah asas kebebasan berkontrak.

Kata Kunci : franchise, perlindungan hukum, perjanjian

Abstract

Along with the changing times, the franchise business is growing rapidly in the midst of society. This very practical business has not yet been anticipated or specifically regulated by law. Because there is no specific arrangement. Although up to now there are no laws and regulations specifically regulating franchise institutions, it does not mean that these institutions have no legal basis at all. This is due to the franchise institutions contained in the legal relations of the parties as a result of the agreements made, of course the principle that can be used as a benchmark is the principle of freedom of contract.

Keywords : franchise, legal protection, agreement

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan bisnis perdagangan di Indonesia menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup pesat. Franchise yang merupakan suatu perjanjian yang berisi mengenai pemberian hak kepada seseorang atau perusahaan untuk menggunakan nama merek dagang nya. Didalam menggunakan nama merek dagang memerlukan sebuah perjanjian yang melibatkan dua pihak (Basarah, 2008).

Franchise telah berkembang di Indonesia sejak lama tetapi hingga kini belum di antisipasi atau mendapatkan pengaturan hukum secara khusus. Karena ketiadaan pengaturan secara khusus tersebut maka ada sementara kalangan yang mempertanyakan dasar hukumnya. Walaupun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur lembaga franchise, tidak berarti bahwa lembaga ini sama sekali tidak mempunyai dasar hukum eksistensinya. Hal

ini disebabkan pada lembaga franchise di dalamnya terkandung hubungan-hubungan hukum para pihak sebagai akibat perjanjian yang mereka buat, tentunya asas yang pertama-tama dapat dijadikan eksistensinya adalah asas kebebasan berkontrak.

Di dalam menjalankan bisnis franchise terdapat perjanjian yang melibatkan dua pihak. Pihak franchisee yang harus memenuhi kewajiban nya untuk melakukan hal yang tidak dilanggar didalam perjanjian. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas dinyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka sebagai undang-undang. Ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi para pihak agar dapat membuat ketentuan sendiri yang dapat mengikat kedua pihak agar terdapat kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian franchise dengan berdasarkan hukum perjanjian? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian franchise?

Kemudian tujuan dicapainya oleh penulis dalam penelitian ini adalah : (1) Mengetahui pelaksanaan perjanjian franchise dengan berdasarkan hukum perjanjian (2) Mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian franchise.

Selanjutnya manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah (1) Digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perdagangan, perjanjian dan bidang hukum lainnya khususnya Perjanjian Franchise (2) Menjadi dasar acuan data untuk penelitian yang lebih lanjut dalam permasalahan yang sama (3) Memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat dalam memahami pengetahuan hukum terkait Perjanjian Franchise.

2. METODE

Metode pendekatan yang penulis pakai normatif doktrinal, karena hukum dikonsepkan sebagai peraturan perundang-undangan yang tertulis atau sebagai norma yang dijadikan patokan oleh manusia dalam berperilaku (Amiruddin &

Asikin, 2018). Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian deskriptif, karena penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Amiruddin & Asikin, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan perjanjian franchise berdasarkan hukum perjanjian, dimana terdapat dua pihak yakni pihak franchisor dan franchisee, dimana dalam franchise Solchic pihak franchisor disebut sebagai Management Solchic dan pihak franchisee disebut sebagai Mitra Mandiri. Dalam melaksanakan perjanjian kontrak kerja sama kedua belah pihak melakukan perjanjian atas asas kebebasan berkontrak asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan perjanjian franchise berpacu pada Pasal 1313 KUHPdata yang mana terdapat beberapa syarat sah perjanjian yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hak tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam perjanjian franchise yang terdapat 2 pihak yaitu franchisor dan franchisee yang mana dalam perjanjian franchise Solchic yakni Management Solchic dan Mitra Mandiri telah sesuai dengan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan No 71 Tahun 2019 mengatur mengenai subyek hukum.

Terdapat objek hukum yang merupakan suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Dalam perjanjian kerjasama franchise Solchic telah sesuai dengan objek hukum yang diatur dalam Pasal 3 PP No 42 Tahun 2007 memuat beberapa klausula objek perjanjian agar dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian. Dalam perjanjian franchise Solchic terdapat beberapa klausula hak dan kewajiban masing-masing pihak antara Management Solchic dan Mitra Mandiri yang mana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur pada PP No 42 Tahun 2007 yang mana hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut harus dipenuhi agar perjanjian dapat terlaksana dengan baik.

Sebuah perjanjian memiliki waktu 5 tahun atau 10 tahun yang dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak apabila disepakati bersama. Dalam perjanjian franchise Solchic, perjanjian tersebut dapat berakhir apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjiannya atau lalai dapat diputus oleh salah satu pihak yang tidak melakukan wanprestasi yang telah sesuai dengan pengaturannya yang terdapat pada Pasal 8 Permendag No 53 Tahun 2012. Kedua belah pihak dapat mengakhiri atau membatalkan perjanjian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau lalai. Apabila terdapat wanprestasi dalam sebuah perjanjian maka salah satu pihak dapat mengakhiri atau membatalkan suatu perjanjian. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan di Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian franchise Solchic apabila timbul sengketa diantara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta yang mana telah sesuai dengan Pasal 16 dan 17 PP No 42 Tahun 2007 terdapat 3 sanksi yakni peringatan tertulis, denda, dan/ atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

Perjanjian franchise yang melibatkan dua pihak yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dan harus memenuhi agar tidak terjadi wanprestasi atau sengketa. Dimana kedua belah pihak dalam melakukan pembuatan kontrak atau perjanjian adanya syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata yang mengatur mengenai kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian franchise ini merupakan salah satu jenis perjanjian yang tidak bernama yang mana mempunyai makna perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Perjanjian tidak bernama ini merupakan perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus, yang mana perjanjian ini keberadaannya diperbolehkan dalam masyarakat asal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggarnya. Lahirnya perjanjian ini dalam praktek berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak atau asas kebebasan dalam mengadakan suatu perjanjian (Sari, 2016).

Didalam perjanjian kontrak franchise Solchic ini perlindungan hukumnya mengacu pada represif dimana apabila terjadi sengketa antara pihak Management Solchic dengan Mitra Mandiri maka pihak yang menyelesaikannya ialah Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang telah disepakati dalam kontrak kerja sama perjanjian franchise Solchic. Kedua belah pihak dalam perjanjian franchise ini yakni franchisor dan franchisee mengacu pada perjanjian yang mana perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka Management Solchic dan Mitra Mandiri hanya berpacu pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya agar tidak menimbulkan permasalahan. Para pihak dalam perjanjian franchise Solchic memilih penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan yang mana perlindungan hukum represif.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaan perjanjian franchise berdasarkan hukum perjanjian, dimana terdapat dua pihak yakni pihak franchisor dan franchisee, dimana dalam franchise Solchic pihak franchisor disebut sebagai Management Solchic dan pihak franchisee disebut sebagai Mitra Mandiri. Dalam melaksanakan perjanjian kontrak kerja sama kedua belah pihak melakukan perjanjian atas asas kebebasan berkontrak asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan perjanjian franchise berpacu pada Pasal 1313 KUHPdata yang mana terdapat beberapa syarat sah perjanjian yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hak tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian franchise yang terdapat 2 pihak yaitu franchisor dan franchisee yang mana dalam perjanjian franchise Solchic yakni Management Solchic dan Mitra Mandiri telah sesuai dengan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan No 71 Tahun 2019 mengatur mengenai subyek hukum. Dalam perjanjian franchise Solchic terdapat beberapa klausula hak dan kewajiban masing-masing pihak antara Management Solchic dan Mitra Mandiri yang mana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur pada PP No 42

Tahun 2007 yang mana hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut harus dipenuhi agar perjanjian dapat terlaksana dengan baik. Kedua belah pihak dapat mengakhiri atau membatalkan perjanjian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau lalai. Apabila terdapat wanprestasi dalam sebuah perjanjian maka salah satu pihak dapat mengakhiri atau membatalkan suatu perjanjian. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan di Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.

Perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian franchise diatur pada Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012. Perjanjian kontrak franchise Solchic ini perlindungan hukumnya mengacu pada represif apabila terjadi sengketa antara pihak Management Solchic dengan Mitra Mandiri maka pihak yang menyelesaikannya ialah Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang telah disepakati dalam kontrak kerja sama perjanjian franchise Solchic. Kedua belah pihak dalam perjanjian franchise ini yakni Management Solchic dan Mitra Mandiri mengacu pada perjanjian yang mana perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka Management Solchic dan Mitra Mandiri hanya berpacu pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya agar tidak menimbulkan permasalahan. Para pihak dalam perjanjian franchise Solchic memilih penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan yang mana perlindungan hukum represif.

4.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang penulis uraikan, selanjutnya penulis mengemukakan saran yang diharapkan dapat berguna dalam perkembangan franchise di Indonesia: Franchise di Indonesia telah ada sejak lama dan telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan jaman dan telah banyak yang menggeluti bidang ini di masyarakat. Tetapi, peraturan mengenai franchise sampai saat ini hanya sebatas Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan Menteri Perdagangan, maka dari itu, diharapkan Pemerintah segera membuat Undang-Undang mengenai Franchise.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Basarah, Moch dan Mufidin, Faiz. (2008). *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sari, Putu Prasmita. (2016). “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise”. *E-Journal Ilmu Hukum Kherta Semaya*. Vol 4. No. 5. 2016.